

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA PROGRAM
PENGEMBANGAN KAWAS TRANSMIGRASI DI DINAS SOSIAL,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Ruben S. Kannapadang
UKI Toraja

rubenkannapadang02@gmail.com

ABSTRAK

Judul penelitian; Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara, merupakan variabel penting untuk diteliti, di mana akan menggambarkan kinerja Dinas merealisasikan program kerjanya, baik secara fisik maupun non fisik. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data dan dokumen-dokumen sehubungan dengan masalah yang akan dibahas, kemudian diolah dengan membandingkan anggaran dan realisasi anggaran serta dokumen realisasi fisik sesuai program dan anggarannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi program kerja dan anggaran masing-masing program kerja tersebut. Fakta empiris yang ditemukan menunjukkan bahwa : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara khusus pada Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, selama tahun anggaran 2017 telah bekerja secara efisien dalam penggunaan anggaran, dan efektif merealisasikan program kerja; Semua program kerja yang ada pada tahun 2017 terealisasi dengan baik; Sisa anggaran yang dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp 40.561.450,-

Kata kunci: Anggaran, program kerja.

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah transmigrasi di Indonesia yang sudah mencapai satu abad lebih, sejak mulai dilaksanakan pada jaman pemerintahan kolonial Belanda tahun 1905 hingga saat ini telah melalui berbagai masa pemerintahan dan kekuasaan yang berbeda. Penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,

sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tujuan, arah dan ruang lingkup dari pembangunan nasional.

Program transmigrasi memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan daerah, karena transmigrasi pada hakikatnya merupakan pembangunan daerah atau bagian integral dari pembangunan daerah, melalui pembangunan

permukiman dan kawasan transmigrasi. Program transmigrasi juga merupakan perwujudan Nawa Cita ketiga pemerintahan Jokowi-JK, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Salah satu program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara memiliki kewajiban untuk secara terus menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politikal dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan

akuntabilitas adalah pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang sentralistis, ketika pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas yang

lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. (Mahmudi 2010: 135) Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (publik fund) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga

BAHAN DAN METODE

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik

mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan. (Mahmudi 2010: 155) Objek penelitian dalam proposal ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipilih sebagai objek karena merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka penulis memilih judul Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara.

analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang

objektif mengenai keadaan yang

Hasil Dan Pembahasan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara, adalah merupakan salah satu entitas pengguna anggaran, baik yang bersumber dari APBD, maupun APBN, dan juga sekaligus sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas membantu Bupati menyelenggarakan tugas di bidang Sosial, Tenaga Kerja,

diteliti .

dan Transmigrasi di Kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari objek penelitian (Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi), secara khusus pada bidang Transmigrasi diketahui bahwa program kerja yang diselenggarakan untuk tahun 2017 adalah sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut:

PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI 2017

NO	NAMA PROGRAM	STN	VOL	BIAYA
Pengembangan Sarana Dan Prasarana				
1	Pemeliharaan jalan dan jembatan	Keg	1	Rp 10.000.000,-
2	Pengembangan jalan	Km	6	Rp 2.437.425.000,-
3	Pengembangan jembatan	M	15	Rp 600.000.000,-
4	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Unit	1	Rp 12.000.000,-
J u m l a h				Rp 3.059.425.000,-
Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi				
1	Bantuan pengembangan usaha tani tanaman pangan	KK	200	Rp 603.600.000,-
2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi	Keg	1	Rp 24.300.000,-
3	Pembentukan dan pengembangan Poktan	Keg	1	Rp 20.000.000,-
4	Penguatan dan pengembangan Koperasi	Lmbg	1	Rp 29.560.000,-
5	Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan	Keg	1	Rp 70.750.000,-
J u m l a h				Rp 748.310.000,-
Peningkatan SDM Di Kawasan Pemukiman Transmigrasi				
1	Bantuan pendidikan	Org	300	Rp 89.600.000,-
2	Bantuan seni budaya	Pkt	1	Rp 10.000.000,-
3	Pembinaan mental spiritual	Pkt	1	Rp 32.600.000,-
4	Kelembagaan Kimtrans	Pkt	1	Rp 158.050.000,-

5	Kelembagaan pemukiman transmigrasi	Pkt	1	Rp	90.550.000,-
6	Kelembagaan pemerintah Desa	Pkt	1	Rp	47.500.000,-
7	Kelembagaan masyarakat	Pkt	1	Rp	20.000.000,-
8	Pengadaan bantuan non beras dan pendistribusian	KK	200	Rp	775.450.000,-
9	Bantuan kesehatan	Org	400	Rp	150.300.000,-
J u m l a h					Rp 1.216.000.000,-
Dukungan Manajemn dan Dukungan Teknis					
1	Pelayanan perkantoran	Bln	12	Rp	226.792.000,-
3	Perencanaan dan pengelolaan	Dok	2	Rp	37.336.000,-
4	Laporan kegiatan dan pembinaan	Lap	2	Rp	36.613.000,-
5	Kendaraan roda 2	Unit	1	Rp	25.000.000,-
J u m l a h					Rp 325.741.000,-

Sumber: Dinas Sosia, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Data diolah kembali.

**REALISAI ANGGARAN BELANJA
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI 31
DESEMBER 2017
(dalam rupiah)**

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	BELANJA	SISA ANGGARAN	%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi					
1	Pengembangan Jalan				
	a. Honor output kegiatan	4.500.000	4.500.000	0	100
	b. Belanja barang non operasional	5.500.000	5.500.000	0	100
	c. Belanja penambahan nilai jalan dan jembatan	3.037.425.000	3.020.197.000	17.232.000	99,43
2	Pengembangan bangunan fasitas umum				
	a. Honor output kegiatan	4.500.000	4.500.000	0	100
	b. Belanja barang non operasional	7.500.000	7.500.000	0	100

Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi					
1	Lahan Usaha Produktif di Pemukiman Transmigrasi				
	a. Belanja barang diserahkan kepada masyarakat	603.600.000	581.831.250	21.768.750	96,39
	b. Belanja perjalanan	9.300.000	9.300.000	0	100
	c. Belanja brg lain diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	15.000.000	15.000.000	0	100
2	Kelembagaan Ekonomi Kimtrans/KTM				
	a. Belanja bahan	4.300.000	4.300.000	0	100
	b. Honor output kegiatan	7.500.000	7.500.000	0	100
	c. Biaya barang non operasi	2.250.000	2.250.000	0	100
	d. Belanja jasa profesi	7.800.000	7.800.000	0	100
	e. Belanja perjalanan	2.560.000	2.560.000	0	100
	f. Belanja brg lain diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	25.250.000	25.250.000	0	100
3	Wirausaha Kimtrans/KTM				
	a. Belanja bahan	7.500.000	7.500.000	0	100
	b. Belanja brg non operasi	2.250.000	2.250.000	0	100
	c. Belanja jasa profesi	20.300.000	20.300.000	0	100
	e. Belanja perjalanan	15.700.000	15.700.000	0	100
	f. Belanja brg lain diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	25.000.000	25.000.000	0	100
Peningkatan SDM Di Kawsan Pemukiman Transmigrasi					
1	Kelembagaan Kimtrasn/KTM dan Masyarakat yang Mandiri				
	a. Belanja bahan	7.500.000	7.499.000	1.000	99,99

	b. Biaya honor output kegiatan	88.800.000	88.800.000	0	100
	c. Belanja brg non operasional	53.250.000	53.250.000	0	100
	f. Belanja pemeliharaan dan peralatan	6.000.000	6.000.000	0	100
	g. Belanja perjalanan	2.500.000	2.500.000	0	100
2	Bantuan Pangan				
	a. Belanja bahan	750.000	750.000	0	100
	b. Belanja barang non operasi	17.500.000	17.494.000	6.000	99,97
	c. Belanja perjalanan	7.200.000	7.200.000	0	100
	d. Belanja brg lainnya diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	690.000.000	688.525.500	1.474.500	99,79
3	Bantuan Kesehatan				
	a. Belanja honor output kegiatan	15.600.000	15.600.000	0	100
	b. Belanja brg non operasi lainnya	53.200.000	53.200.000	0	100
	c. Belanja brg lainnya diserahkan kepada masyarakat/PEMDA	81.500.000	81.454.800	35.200	99,96
Dukungan Manajemn dan Dukungan Teknis					
1	Layanan Perkantoran				
	a. Belanja honor operasi satuan kerja	128.460.000	128.460.000	0	100
	b. Belanja bahan	16.500.000	16.474.000	26.000	99,84
	c. Belanja barang non operasional	3.000.000	3.000.000	0	100
	d. Belanja perjalanan	78.832.000	78.814.000	18.000	99,98
2	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran				
	a. Belnja bahan	1.000.000	1.000.000	0	100

	b. Belanja perjalanan	36.336.000	36.336.000	0	100
3	Laporan Kegiatan dan Pembinaan				
	a. Belanja bahan	15.750.000	15.750.000	0	100
	b. Belanja perjalanan biasa	20.863.000	20.863.000	0	100
4	Kendaraan Roda 2				
	a. Belanja modal peralatan dan mesin	25.000.000	25.000.000	0	100
T o t a l		5.289.476.000	5.248.914.550	40.561.450	99,23

**Sumber: Dinas Sosia, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Data diolah kembali.**

Dari hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel 4.1. dan 4.2. di atas, diketahui bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara khusus pada Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, selama tahun anggaran 2017 telah bekerja secara efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran, merealisasikan program kerjanya. Hal ini dapat dibuktikan dari perhitungan realisasi

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu SKPD yang bertugas menyelenggarakan tugas Bupati melalui pelayanan

anggaran selama tahun 2017 menunjukkan adanya sisa anggaran yang dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp 40.561.450,- dengan ketentuan bahwa semua program kerja terselesaikan secara tuntas.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Toraja Utara telah menunjukkan motivasi kerja yang berkinerja.

- sosial, ketenaga kerjaan dan pengembangan pelayanan pemukiman transmigrasi di wilayah Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara.
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara, Bidang Transmigrasi, telah membuat program kerja secara baik dan terealisasi sesuai rencana, di mana menghabiskan dana sebesar

Rp5.248.914.550,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 5.289.476.000,- .

3. Bidang Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara, telah bekerja secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro Gunawan, (2011), *Anggaran Perusahaan*, Buku 1, cetakan keempat, Penerbit BPFE – Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.
- Indiantoro, Supomo. 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ketiga. Penerbitan Erlangga, Jakarta.
- Mursyidi, (2009), *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, Cetakan pertama, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Soemarso, SR. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. PT. Rimeka Cipta, Jakarta.
- Soeratno, 2008. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Andi, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Kuantitatif*. Edisi Kedua. UPP AMP YKPN, Yogyakarta

